

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinamika yang terjadi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait ketersediaan ruang terbuka hijau memanglah menjadi sebuah isu yang antar dimensi, kompleks dan multi hierarki dengan dilihat dari kacamata sistem pemerintahan, ekologi, ekonomi, dan demografi. Pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau menemukan bahwa perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah akar dari sulitnya menciptakan luasan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total wilayah DKI Jakarta. Karena hal tersebut dilakukan penghitungan dengan rumus tertentu yang sudah disediakan dalam juknis RTRW yang telah dirumuskan oleh BAPPEDA dalam mempertahankan KDH sebagai salah satu variabel penentu luasan RTH agar tetap terpenuhi dari segi fungsi, kuantitas, dan kualitas.

Selain itu terdapat kendala dari eksekutor dari kebijakan ruang terbuka hijau seperti keterbatasan pendataan lahan yang terbengkalai yang dimiliki oleh privat dalam upaya inventarisasi lahan yang akan dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas luasan ruang terbuka hijau. Masyarakat pun memiliki urgensi lain dari penggunaan lahan yang dimiliki berdasarkan SHB yang dimiliki sehingga pemerintah juga

diharuskan melakukan negosiasi dan sosialisasi dalam melakukan perluasan ruang terbuka hijau di Jakarta.

Untuk kedepanya diharapkan bagi aktor yang memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penyelarasan isu kepada aktor masyarakat sehingga pembangunan wilayah hijau dan keterbutuhan akan ruang terbuka hijau dapat dimengerti dan dirasakan oleh seluruh pihak, tidak hanya untuk generasi sekarang, melainkan juga bagi generasi mendatang untuk dapat menikmati hasil dari apa yang telah diupayakan selama ini dalam menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau.